

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi, yang menjelaskan kemampuan suatu negara dalam meningkatkan produksi barang dan jasa secara berkelanjutan. Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan pendapatan per-kapita dan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari masa ke masa (Ganet Aribowo, 2023). Dalam praktik ekonometrik dan analisis pembangunan, pertumbuhan ekonomi biasanya diukur melalui *Gross Domestic Product (GDP)*, karena indikator ini mencerminkan total nilai output suatu negara dalam suatu periode tertentu dan menjadi tolok ukur utama dalam menilai kemajuan ekonomi nasional (Adam & Pujiati, 2025).

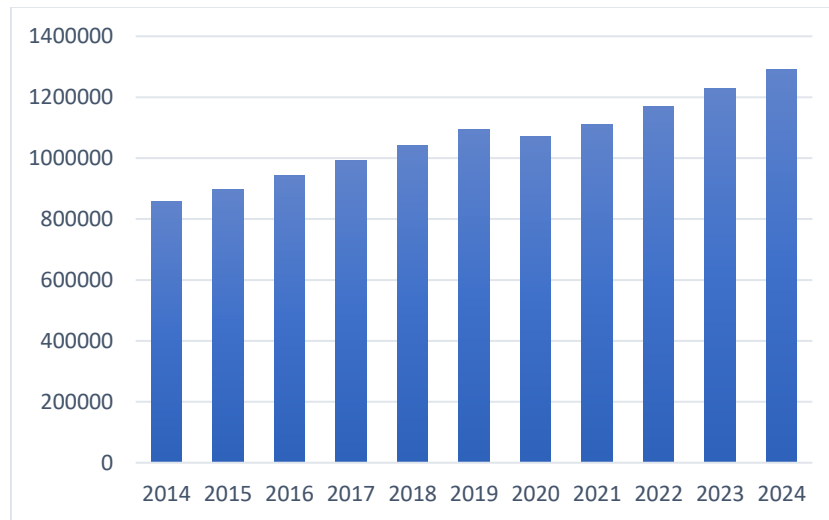
Tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara mencerminkan meningkatnya kemampuan negara dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan proses pembangunan ekonomi, yang dalam implementasinya sangat dipengaruhi oleh kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi utama. Kondisi tersebut sesuai dengan teori pertumbuhan endogen yang menyatakan bahwa sumber daya manusia sebagai faktor internal turut memengaruhi proses pertumbuhan ekonomi (Sari et al., 2024). Sumber daya manusia yang produktif dan kompeten berperan signifikan dalam mendorong efisiensi, inovasi, dan daya saing ekonomi, sehingga turut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan (Hodijah et al., 2021). Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi tujuan akhir

pembangunan, melainkan juga menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan dan stabilitas ekonomi yang lebih luas (Ivonia et al., 2024).

Melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki oleh negara berkembang dan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki potensi untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Kaimuddin, 2024). Peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya penting untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran, tetapi juga menjadi prasyarat penting dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, dalam kenyataannya, pertumbuhan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia sering menghadapi berbagai tantangan struktural yang kompleks, termasuk ketimpangan, keterbatasan infrastruktur, serta tekanan lingkungan dan sosial yang harus dikelola secara simultan (Maharani & Boedirochminarni, 2024).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang bersifat jangka panjang. Hal ini didasari oleh tiga alasan. Pertama, jumlah penduduk terus bertambah. Bertambahnya jumlah penduduk ini menandakan bahwa angkatan kerja akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang diciptakan akan dapat menyediakan kesempatan kerja bagi angkatan kerja. Jika pertumbuhan ekonomi lebih sedikit dari pada pertumbuhan angkatan kerja, kondisi ini dapat menimbulkan masalah pengangguran. Kedua, perekonomian harus dapat memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ketiga, dalam menciptakan pemerataan ekonomi (*economic stability*) dapat dilakukan melalui redistribusi pendapatan (*income redistribution*), hal ini dapat dicapai dalam periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Fandi & Latif, 2024).

Gambar 1. 1 Nilai GDP Indonesia Tahun 2014-2024 (Rupiah Konstan)



Sumber : *World Bank (data diolah) 2026*

Berdasarkan data *World Bank* pada grafik GDP *constant LCU* (rupiah konstan) tersebut, nilai GDP Indonesia meningkat dari sekitar Rp8,9 kuadriliun pada tahun 2014 menjadi sekitar Rp10,9 kuadriliun pada tahun 2019, atau tumbuh sekitar 22,5% selama periode tersebut. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi sekitar Rp10,7 kuadriliun, yang berarti mengalami kontraksi sekitar 1,8% dibandingkan tahun 2019. Setelah itu, GDP kembali meningkat secara konsisten hingga mencapai sekitar Rp12,9 kuadriliun pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan posisi terendah tahun 2020, kenaikan hingga 2024 mencapai sekitar 20,6%, yang menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mengalami pemulihan yang kuat dan kembali berada pada jalur pertumbuhan jangka panjang dalam konteks pertumbuhan riil.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya dan aktivitas ekonomi dalam transformasi struktural efektif terhadap peningkatan pendapatan nasional, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Sultan et al., 2023). Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan angka

GDP mencerminkan terjadinya transformasi struktural di Indonesia, di mana sektor industrialisasi memainkan peran sentral dalam menggeser basis ekonomi tradisional menuju sektor manufaktur yang lebih produktif dan memiliki nilai tambah tinggi. Sebagai penggerak utama (*engine of growth*), industrialisasi tidak hanya berfungsi meningkatkan output nasional secara kuantitatif, tetapi juga menjadi fondasi bagi modernisasi ekonomi yang memperkuat resiliensi GDP terhadap guncangan eksternal.

Industrialisasi merupakan proses perubahan kondisi sosial ekonomi yang awalnya dari sistem berpencaharian sektor agraris menjadi sektor industri. Industrialisasi ialah suatu kondisi masyarakat yang berfokus pada ekonomi meliputi pekerjaan yang beraneka ragam (spesialisasi), gaji, serta meningkatnya penghasilan. Industrialisasi bisa disimpulkan sebagai bagian dari proses modernisasi yang terjadi meliputi perubahan sosial dan perkembangan ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan inovasi teknologi (Oentoro et al., 2024).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari kontribusi sektor industrinya yang merupakan indikator kemajuan ekonomi negara. Peran industri dan pertumbuhan ekonomi diibaratkan dengan dua sisi mata uang, karena sektor industri berkontribusi dalam menciptakan nilai tambah, mendorong transfer teknologi, serta menyerap tenaga kerja yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Oentoro et al., 2024). Oleh karena itu, industrialisasi menjadi strategi yang tepat untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan nasional, sektor industri diprioritaskan sebagai sektor unggulan dibandingkan sektor ekonomi lainnya karena memiliki kemampuan mendorong produktivitas, meningkatkan daya saing, serta memperkuat struktur perekonomian. Dengan demikian, pembangunan

sektor industri menjadi salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Lestari & Ainulyaqin, 2022).

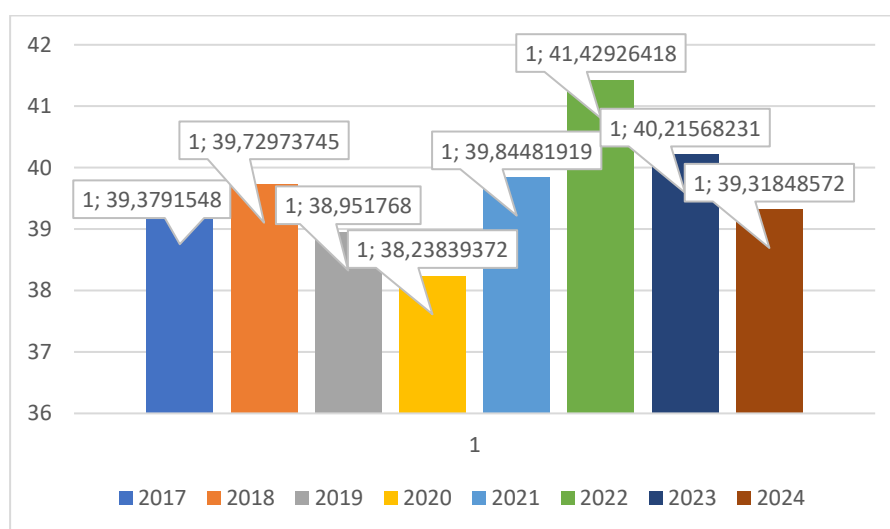
Sektor industri juga berperan sebagai mesin penggerak pembangunan ekonomi karena mampu meningkatkan kapitalisasi modal, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, serta menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan baku yang diolah (Oentoro et al., 2024). Selain itu, sektor industri juga menjadi sumber utama dalam meningkatkan ekspor, mengurangi ketergantungan pada impor, dan menciptakan stabilitas ekonomi. Dengan adanya perkembangan industri, negara dapat menciptakan lapangan kerja baru yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Prabowo, 2025).

Dalam konteks Indonesia, sektor industri telah menunjukkan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur menjadi penyumbang terbesar terhadap GDP selama beberapa tahun terakhir (Eki Indriyanti et al., 2023). Namun demikian, aktivitas industri berlangsung dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan fluktuatif sehingga berbagai perubahan, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal, dapat memengaruhi kinerja sektor industri dan keberlanjutan proses industrialisasi (Eliza et al., 2023).

Pada 2012, Indonesia mulai mengalami deindustrialisasi. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi sektor industri terhadap GDP harga konstan mengalami penurunan dari 23,96 persen pada 2012 menjadi 18,34 persen pada 2022. Deindustrialisasi ternyata juga diikuti dengan pesatnya pertumbuhan sektor jasa dan yang berakibat pada terbatasnya daya saing industri. Impor terpaksa harus dilakukan karena lebih menguntungkan untuk mengimpor dibandingkan memproduksi didalam negeri, serta minimnya pasokan barang untuk konsumsi.

Kondisi tersebut menyebabkan pesatnya pertumbuhan sektor perdagangan dan ketergantungan pada ekspor komoditas berbasis sumber daya alam. Produk industri yang diekspor-pun masih sedikit, dan produk yang biasanya dieskpor adalah produk yang berorientasi padat karya dan berteknologi rendah (Setiawan, et al., 2024).

Gambar 1. 2 Kontribusi Industri Terhadap GDP Tahun 2017-2024 (Dalam Persen)



Sumber : World Bank (data diolah) 2026

Berdasarkan gambar industrialisasi di atas menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri (tidak termasuk konstruksi) dari *Gross Domestic Product (GDP)* Indonesia periode 2017 sampai 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 kontribusi industri sebesar 39,38% dari GDP, kemudian meningkat menjadi 39,73% pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 38,95% atau turun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 38,24%, yang menunjukkan adanya perlambatan aktivitas industri. Memasuki tahun 2021, kontribusi industri meningkat menjadi 39,84% atau naik dari tahun 2020. Kenaikan berlanjut pada tahun 2022 hingga mencapai 41,43%,

yang merupakan nilai tertinggi dalam periode tersebut. Namun, pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 40,22% atau turun sekitar 1,21 poin persentase dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 39,32%. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa tingkat industrialisasi Indonesia cenderung berfluktuasi, meskipun sempat mengalami peningkatan signifikan pasca 2020. Kondisi ini mencerminkan dinamika struktur ekonomi Indonesia, dimana sektor industri memiliki peran penting dalam pembentukan GDP, namun tetap dipengaruhi oleh perubahan permintaan domestik dan global, stabilitas ekonomi, serta kebijakan industri nasional.

Di samping itu, industrialisasi memiliki sisi dilematis. Di satu sisi, industrialisasi mendorong peningkatan GDP melalui ekspansi produksi, namun di sisi lain berpotensi memicu pelemahan sektor pertanian, kesenjangan ekonomi, serta eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja (D. S. T. Lestari & Ainulyaqin, 2022). Masalah yang sering dihadapi dalam proses industrialisasi di Indonesia meliputi berbagai aspek struktural dan kelembagaan, antara lain keterbatasan ketersediaan pangan dan energi sebagai input produksi, keterbatasan akses terhadap modal, inkonsistensi kebijakan pemerintah, rendahnya daya beli masyarakat, serta tantangan otomatisasi dan digitalisasi sebagai dampak Revolusi Industri 4.0, termasuk masih lemahnya kapasitas penelitian dan pengembangan (*research and development*) (Diep, 2022).

Keterbatasan energi dan bahan baku dapat menghambat efisiensi serta meningkatkan biaya produksi, sementara akses pembiayaan yang belum merata menyulitkan pelaku industri untuk melakukan ekspansi dan inovasi. Di sisi lain, rendahnya daya beli masyarakat berdampak pada terbatasnya permintaan domestik, sehingga kapasitas produksi tidak sepenuhnya terserap oleh pasar.

Transformasi digital yang menuntut adaptasi teknologi tinggi juga menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi industri yang belum memiliki kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Permasalahan tersebut bukan hanya dialami oleh industri berskala besar, namun juga dialami industri berskala kecil dan menengah (IKM) yang memiliki keterbatasan kapasitas manajerial, teknologi, dan akses pasar (Hadi et al., 2021). Fenomena ini menunjukkan adanya peran ganda industrialisasi pada tahap awal pembangunan, industrialisasi cenderung meningkatkan degradasi lingkungan akibat intensitas energi yang tinggi, tetapi di tingkat pembangunan yang lebih maju, industrialisasi yang berkelanjutan diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan kualitas lingkungan (Li & Zhang, 2025).

Proses industrialisasi yang berkelanjutan dan kompetitif memerlukan dukungan pembiayaan serta teknologi yang besar, yang dalam perekonomian terbuka sangat bergantung pada arus masuk investasi asing atau *Foreign Direct Investment (FDI)*. Kehadiran FDI tidak hanya berperan sebagai sumber modal eksternal bagi sektor manufaktur nasional, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam transfer teknologi dan pengetahuan guna meningkatkan efisiensi industri domestik. Investasi asing tidak hanya menyediakan modal tambahan, namun juga membawa teknologi, manajemen modern, dan jaringan pasar global (Utami et al., 2025).

Investasi Asing Langsung atau istilah (*Foreign Direct Investment/FDI*) menjadi salah satu instrumen penting dalam perekonomian modern, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Investasi adalah suatu sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan modal atau stok kapital dimana stok tersebut menentukan kapasitas perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan

jasa-jasa (Saragih & Aslami, 2022). Kehadiran FDI tidak hanya dimaknai sebagai penanaman modal dari luar negeri, tetapi juga sebagai katalisator yang mampu mempercepat proses pembangunan ekonomi melalui peningkatan kapasitas produksi, penyediaan lapangan kerja, dan masuknya teknologi baru. Dalam konteks globalisasi yang semakin intensif, FDI berperan strategis sebagai jembatan yang menghubungkan pasar domestik dengan jaringan perdagangan internasional (Agma, 2025).

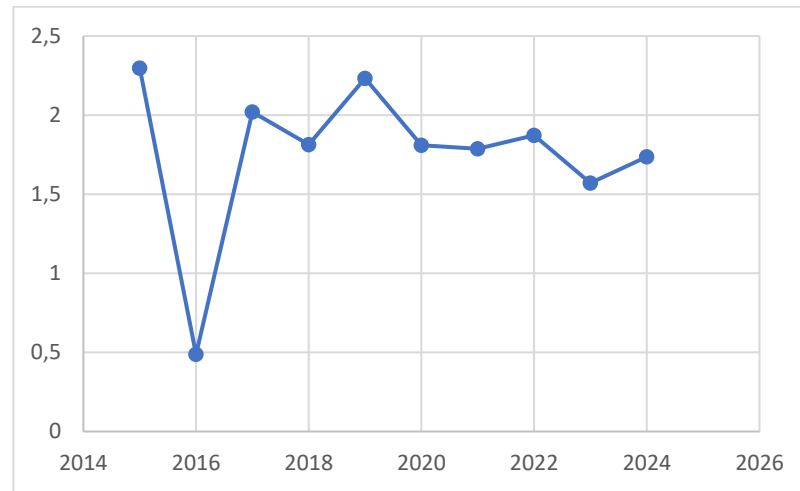
Sebagai modal pembangunan, investasi ini memegang peranan krusial dalam laju pertumbuhan ekonomi suatu negara, bukan hanya sekedar penggerak roda perekonomian saja (Wahyuni, 2024). Selain kontribusi pada aspek pembiayaan, kehadiran investor asing seringkali mendorong peningkatan daya saing industri nasional melalui transfer pengetahuan (*knowledge spillover*) dan praktik manajemen modern (Alawiyah Matondang et al., 2025). Aktivitas investasi ini menumbuhkan efek berantai (*multiplier effect*), yaitu kondisi pada setiap dana yang diinvestasikan memicu pertumbuhan lain di sektor-sektor ekonomi terdekat, pendapatan nasional meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup masyarakat yang meningkat secara keseluruhan (Riesvandha, 2025). Peran strategis ini pulalah yang mendorong Pemerintah Indonesia secara konsisten merumuskan berbagai kebijakan untuk menarik arus investasi asing guna memperkuat fondasi ekonomi (Santi & Sasana, 2020)..

Foreign Direct Investment (FDI) memberikan kontribusi pada pertumbuhan GDP melalui peningkatan arus modal, pembukaan peluang kerja, peningkatan ekspor, dan transfer teknologi. Karena sifatnya yang jangka panjang dan relatif tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi ekonomi, FDI diharapkan dapat mendukung peningkatan investasi yang berkelanjutan di suatu negara. Keberlanjutan FDI ini

akan membawa teknologi, inovasi baru, peningkatan modal, memberikan kesempatan kerja untuk menurunkan jumlah pengangguran, serta memperbaiki kualitas dan kemampuan sumber daya manusia. Maka dari itu, investasi dianggap sebagai faktor besar guna mempercepat peningkatan pertumbuhan perekonomian di negara-negara berkembang .

Di Indonesia, FDI memainkan memainkan peranan yang semakin penting dalam struktur perekonomian, terutama sejak reformasi ekonomi dan semakin terbukanya pasar terhadap investasi asing. Selain menjadi pelengkap investasi domestik dalam memenuhi kebutuhan investasi nasional, FDI juga berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas produksi, transfer teknologi, serta peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan domestik melalui penerapan teknologi dan praktik manajemen yang dibawa oleh investor asing (Fanre et al., 2026). Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menandakan bahwa arus masuk FDI terus meningkat dalam dua dekade terakhir, terutama pada sektor manufaktur, pertambangan, dan jasa. Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya menarik investasi asing, tetapi juga memastikan bahwa kontribusinya benar-benar mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif (Agma, 2025).

Gambar 1. 3 Rasio FDI Net Inflows Terhadap GDP Tahun 2015-2024 (Dalam Persen)



Sumber : World Bank (data diolah) 2026

Secara empiris, dinamika arus masuk FDI di Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif namun tetap kompetitif. Berdasarkan data *World Bank* (2026), rasio *net inflows* FDI terhadap GDP Indonesia periode 2015–2024 mencerminkan pengaruh dinamika global dan domestik. Pada tahun 2015, FDI tercatat sebesar 2,30% dari GDP, namun mengalami kontraksi tajam pada 2016 menjadi 0,50%. Meskipun sempat pulih ke angka 2,20% pada 2019, pandemi global dan ketidakpastian ekonomi menyebabkan FDI bergerak stabil di kisaran 1,6%–1,9% dalam lima tahun terakhir, dengan posisi terakhir pada 2024 berada di angka 1,73%. Secara keseluruhan, meskipun terjadi kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun, dalam lima tahun terakhir FDI cenderung bergerak stabil di kisaran 1,6%–1,9% dari GDP, yang mencerminkan bahwa minat investasi asing terhadap perekonomian Indonesia tetap terjaga meskipun dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global dan domestik.

Namun, untuk memastikan keberlanjutan manfaat dari FDI, diperlukan strategi pengelolaan yang seimbang antara kepentingan investor dengan

kebutuhan pembangunan nasional. FDI dapat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Dampak langsung dapat dilihat dari peningkatan kapasitas produksi, penciptaan kesempatan kerja, serta bertambahnya pendapatan masyarakat. Sementara itu, dampak tidak langsung terlihat pada proses alih teknologi, penguatan jaringan ekonomi global, serta peningkatan daya saing produk lokal di pasar internasional. Semua faktor ini, jika dikelola secara baik, dapat memperkuat fondasi perekonomian nasional sekaligus meningkatkan standar hidup masyarakat (Agma, 2025).

Selain itu, dampak FDI terhadap kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilihat dari sisi makroekonomi, tetapi juga dari aspek sosial dan budaya. Misalnya, masuknya investasi asing dapat mengubah pola konsumsi, struktur tenaga kerja, serta mendorong modernisasi di berbagai sektor. Namun, jika tidak diimbangi dengan regulasi yang tepat, hal ini berpotensi menimbulkan ketergantungan ekonomi maupun menurunnya kemandirian industri lokal. Oleh sebab itu, kajian mengenai peran FDI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi sangat relevan, baik dari perspektif akademik maupun kebijakan publik (Agma, 2025).

Ekspansi kapasitas produksi yang dipicu oleh arus *Foreign Direct Investment (FDI)* tersebut secara konsisten terkonsentrasi pada wilayah-wilayah strategis yang memiliki keunggulan infrastruktur. Konsentrasi investasi dan aktivitas industri di pusat-pusat pertumbuhan ini menciptakan daya tarik ekonomi bagi tenaga kerja dari wilayah perdesaan, yang pada gilirannya memicu laju urbanisasi sebagai konsekuensi logis dari mobilitas penduduk menuju sektor manufaktur dan jasa di perkotaan. Salah satu faktor yang menjadi pendorong mobilisasi masyarakat di desa ke wilayah perkotaan adalah semakin sedikitnya

kesempatan kerja yang ada di pedesaan, kemiskinan di pedesaan akibat pertambahan penduduk, dan meluasnya transportasi pedesaan-perkotaan, semakin terdidik, dan tata cara serta adat terkadang dianggap memberatkan oleh masyarakat desa (Rijal & Tahir, 2022).

Urbanisasi ialah proses meningkatnya proporsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Secara konseptual, urbanisasi tidak hanya dipahami sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota, tetapi lebih tepat diartikan sebagai peningkatan persentase penduduk yang menetap di kawasan perkotaan (*urban area*). Istilah perkotaan (*urban area*) berbeda dengan kota (*city*). Yang diartikan dengan perkotaan (*urban*) ialah suatu daerah atau wilayah yang memenuhi tiga persyaratan, yaitu kepadatan penduduk 5000 orang atau lebih per km persegi; jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian sebesar 25 % atau kurang; dan memiliki 8 atau lebih jenis fasilitas perkotaan (Zahrotul Jannah et al., 2025).

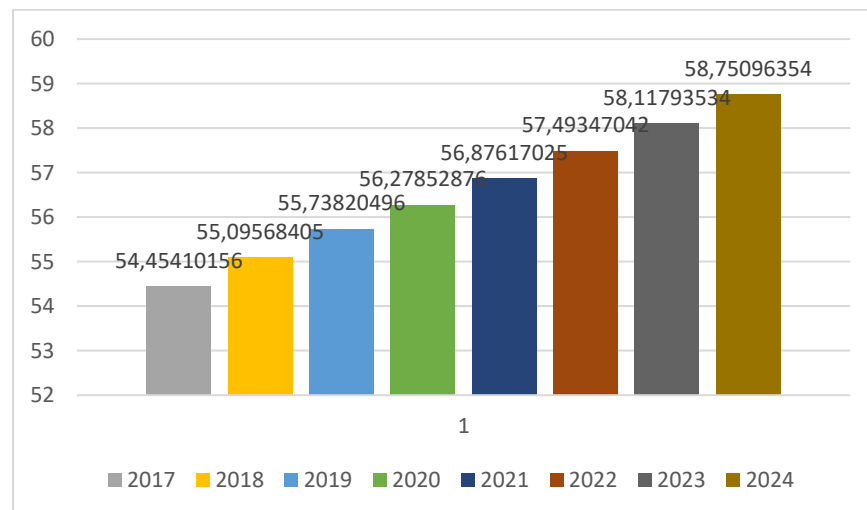
Urbanisasi muncul karena adanya disparitas pertumbuhan atau distribusi sumber daya pembangunan, khususnya pada daerah pedesaan dan perkotaan, di mana kawasan perkotaan umumnya menawarkan peluang ekonomi, infrastruktur, serta akses layanan publik yang lebih baik dibandingkan perdesaan. Kondisi ini menimbulkan perkotaan lebih diminati para pencari kerja, sehingga urbanisasi pada dasarnya merupakan proses alami perubahan struktur demografis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fitri Aini, 2022).

Secara teoritis, urbanisasi juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui efek aglomerasi, yaitu konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan yang mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi produksi, inovasi, serta kemudahan akses

terhadap infrastruktur dan pasar. Perkotaan sering menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan, dan investasi, sehingga urbanisasi dipandang sebagai salah satu faktor penting yang berperan dalam mendorong peningkatan *Gross Domestic Product (GDP)* dalam proses pembangunan ekonomi (Aprilia & Tiarawati, 2008a).

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan fenomena laju pertumbuhan urbanisasi yang pesat di dunia (Isyanah, 2020). Urbanisasi memengaruhi GDP secara signifikan dengan mendorong produktivitas, inovasi, dan konsumsi melalui pemusatan tenaga kerja. Di Indonesia, urbanisasi berkembang pesat sejak era industrialisasi dan semakin meningkat seiring pembangunan infrastruktur dan layanan kota. Pertumbuhan ekonomi kota sering diasosiasikan dengan peningkatan kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan sektor jasa dan industri (Fitri Aini, 2022).

Gambar 1. 4 Tingkat Urbanisasi Indonesia Tahun 2017-2024 (Dalam Persen)



Sumber : World Bank (data diolah) 2026

Berdasarkan gambar tingkat urbanisasi di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan di Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2024 terus mengalami peningkatan secara konsisten. Pada tahun 2017 tingkat urbanisasi sebesar 54,45% kemudian meningkat menjadi 55,10%

pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 55,74% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 tingkat urbanisasi mencapai 56,28% dan terus meningkat pada tahun 2021 menjadi 56,88%. Kenaikan ini menunjukkan adanya perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan yang relatif stabil setiap tahunnya. Kemudian pada tahun 2022 hingga 2024 urbanisasi terus bertambah dari 57,49% menjadi 58,12% dan mencapai 58,75% pada tahun 2024. Secara keseluruhan, proses transformasi struktural ekonomi Indonesia, dimana sektor industri dan jasa di perkotaan semakin berkembang dan menarik migrasi tenaga kerja dari desa ke kota. Kondisi ini menunjukkan tren yang stabil dan progresif, namun di sisi lain urbanisasi yang terus meningkat juga perlu diimbangi dengan penyediaan infrastruktur, lapangan kerja, dan pengelolaan tata kota yang baik agar tidak menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi di wilayah perkotaan.

Kehadiran penduduk baru di wilayah perkotaan mendorong dinamika ekonomi yang cukup signifikan, antara lain melalui pertumbuhan sektor informal, peningkatan konsumsi rumah tangga, serta perluasan basis pasar bagi pelaku usaha (Carolyn & Kurniati, 2025). Urbanisasi dapat mempertahankan tumbuhnya perekonomian di negara berkembang. Adanya lapangan pekerjaan dan fasilitas penunjang, mendesaknya kebutuhan perekonomian, dan menginginkan uang yang jauh lebih banyak merupakan faktor urbanisasi sebagai pendorong GDP (Fitri Wildani et al., 2025a).

Pertumbuhan penduduk perkotaan di yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang kehidupan sosial ekonomi. Kondisi ini dapat menimbulkan permasalahan yang kompleks. Oleh karena itu, urbanisasi dijadikan sebagai faktor

penentu bagi suatu kota apakah dapat tumbuh maju dilihat dari secara fisik, maupun secara sosial. Urbaninisasi dapat dilihat dengan lebih jelas akibat dampak yang ditimbulkannya terhadap kehidupan dikota (Shinta, 2024).

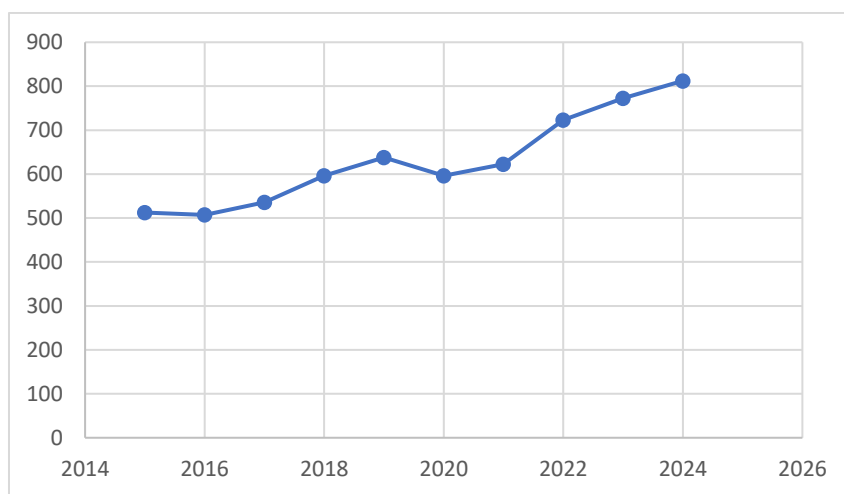
Selain itu, urbanisasi juga memunculkan bermacam macam tantangan. Kepadatan penduduk di perkotaan dapat memicu berbagai masalah sosial maupun ekonomi. Seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, serta kemacetan. Selain itu, tingkat jumlah pabrik dan kendaraan juga memicu pencemaran udara dan kebisingan (Fitri Aini, 2022). Masalah lain juga berdampak pada tingginya harga lahan perkotaan dan pembangunan infrastruktur dari peralihan fungsi lahan (Fitri Wildani et al., 2025b). Transformasi spasial dan peningkatan konsumsi energi di wilayah perkotaan ini pada akhirnya menciptakan beban emisi yang besar, yang kemudian bereskalasi menjadi krisis lingkungan berskala makro. Beberapa tantangan tersebut dapat berakibat pada terganggunya aktivitas ekonomi sehingga berpengaruh pada GDP.

Dalam dua dekade terakhir isu pemanasan global telah menjadi perhatian utama masyarakat internasional (Magazzino et al., 2022). Salah satu penyebab utama fenomena tersebut adalah meningkatnya emisi karbon dioksida (CO_2) akibat aktivitas manusia (F. Z. Putri et al., 2022). Hal itu ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata bumi yang berdampak pada berbagai permasalahan lingkungan, seperti degradasi ekosistem, kekeringan, kenaikan permukaan air laut, kebakaran hutan, serta perubahan pola iklim (Adam & Pujiati, 2025).

Emisi karbon merupakan proses pelepasan karbon ke atmosfer dalam wilayah serta periode waktu tertentu (Arifiyah & Wasil, 2025). Proses pembangunan ekonomi yang ditandai dengan ekspansi sektor industri, transportasi, pertanian, dan penggunaan energi berbasis bahan bakar fosil

menjadi kontributor signifikan terhadap peningkatan emisi CO₂ (Fasikha & Yuliadi, 2018). Oleh karena itu, emisi CO₂ dipandang sebagai indikator utama yang mendorong terjadinya pemanasan global serta berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat (Insani & Robertus, 2024).

Gambar 1. 5 Total Emisi CO₂ Indonesia 2015–2024 (Dalam Satuan Metrik Ton/Mt CO₂)



Sumber : World Bank (data diolah) 2026

Berdasarkan data *World Bank*, grafik Total Emisi CO₂ Indonesia periode 2015–2024 yang diukur dalam satuan juta metrik ton (*million metric tons/Mt CO₂*) menunjukkan tren meningkat dalam jangka panjang dengan fluktuasi pada tahun tertentu. Pada tahun 2015, emisi tercatat sekitar 510 juta metrik ton CO₂, kemudian meningkat secara bertahap menjadi sekitar 630 juta metrik ton pada 2019, yang berarti terjadi kenaikan sekitar 23,5% dalam empat tahun tersebut, mencerminkan peningkatan aktivitas industri, konsumsi energi fosil, serta ekspansi sektor transportasi dan manufaktur. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi sekitar 600 juta metrik ton, atau mengalami kontraksi sekitar 4,8% dibandingkan tahun 2019, yang dapat diinterpretasikan sebagai dampak perlambatan aktivitas ekonomi dan produksi. Setelah periode tersebut, emisi kembali meningkat secara

signifikan dan konsisten hingga mencapai sekitar 820 juta metrik ton pada 2024, yang berarti naik sekitar 36,7% dibandingkan tahun 2020, bahkan sekitar 60,8% lebih tinggi dibandingkan tahun 2015. Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan bahwa emisi CO₂ Indonesia memiliki kecenderungan meningkat seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi, di mana penurunan bersifat sementara dan tidak mengubah tren kenaikan jangka panjang.

Indonesia termasuk salah satu dari sepuluh negara penyumbang emisi karbon terbesar di dunia (Amalina et al., 2023).. Peningkatan emisi CO₂ tersebut tidak terlepas dari tingginya ketergantungan terhadap energi fosil untuk mendukung aktivitas ekonomi. Di satu sisi, penggunaan energi fosil mampu meningkatkan produksi dan mendorong pertumbuhan *Gross Domestic Product (GDP)*, namun di sisi lain juga meningkatkan emisi karbon yang berdampak pada kualitas lingkungan (Ningtyas et al., 2018).

Fenomena peningkatan emisi ini dapat dijelaskan melalui teori *Environmental Kuznets Curve (EKC)* yang dikemukakan oleh Grossman & Helpman (1991) yang menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan dalam tiga tahap perkembangan, yaitu tahap pra-industri, industri, dan pasca-industri. Secara grafis, EKC berbentuk kurva “U” terbalik yang menggambarkan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, peningkatan GDP per kapita cenderung diikuti oleh kenaikan emisi CO₂ akibat meningkatnya aktivitas produksi dan konsumsi (Adam & Pujiati, 2025). Pada fase ini, negara berkembang, termasuk Indonesia, umumnya memprioritaskan ekspansi ekonomi guna mencapai target pertumbuhan, yang seringkali disertai dengan eksploitasi sumber daya alam secara intensif dan berdampak pada degradasi lingkungan (R. Kurniawan et al., 2025).

Kondisi tersebut menimbulkan *trade-off* antara ekspansi ekonomi dan kelestarian lingkungan, di mana peningkatan aktivitas industri dan konsumsi energi mendorong kenaikan emisi CO₂ (Fajriani et al., 2023). Apabila energi dianggap sebagai input dalam proses produksi, maka pemerintah perlu membatasi pasokan energi yang hal ini dapat merugikan pembangunan ekonomi (Zuldareva, 2017). Namun, dalam jangka panjang tekanan lingkungan yang tidak terkendali dapat menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional (Putri et al., 2022). Meningkatnya Emisi CO₂ yang terus terjadi ini dapat memunculkan bermacam-macam gangguan kesehatan pada manusia, kondisi ini dapat menurunkan kesehatan masyarakat, dalam jangka panjang kondisi ini merugikan laju pertumbuhan ekonomi (Fasikha & Yuliadi, 2018)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, sehubungan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh industrialisasi, FDI, urbanisasi, dan emisi CO₂ terhadap GDP masih menghasilkan temuan yang tidak konsisten. Beberapa studi menemukan bahwa industrialisasi dan urbanisasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun dalam kondisi tertentu dapat menjadi tidak signifikan akibat perbedaan struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, FDI menunjukkan hasil yang beragam, di mana pengaruhnya terhadap GDP sering kali bergantung pada faktor pendukung seperti keterbukaan ekonomi dan kapasitas teknologi. Sementara itu, hubungan antara emisi CO₂ dan GDP juga masih diperdebatkan, karena dalam beberapa penelitian menunjukkan hubungan positif (*trade-off*), namun pada tahap tertentu dapat menurun sesuai hipotesis *Environmental Kuznets Curve (EKC)*.

Selain itu, sebagian besar penelitian masih bersifat parsial, hanya menguji beberapa variabel secara terpisah, sehingga belum mampu menjelaskan

hubungan secara simultan antara faktor ekonomi (industrialisasi, FDI), demografi (urbanisasi), dan lingkungan (emisi CO₂) terhadap GDP. Sedangkan pada kenyataannya keempat variabel tersebut saling berinteraksi dalam membentuk dinamika pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, penggunaan metode yang belum sepenuhnya menangkap dinamika jangka pendek dan jangka panjang secara bersamaan juga menjadi keterbatasan dalam penelitian sebelumnya. Di sisi lain, dalam analisis ekonomi makro, perbedaan pengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang sangat penting untuk memahami stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggabungan variabel ekonomi (industrialisasi dan FDI) serta variabel demografi (urbanisasi) serta variabel lingkungan (emisi CO₂) dalam satu model analisis yang menyeluruh terhadap GDP. Dengan menggunakan metode *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) untuk periode 1995–2024, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih dinamis dibandingkan penelitian sebelumnya. Penggunaan metode ARDL sangat tepat untuk menangkap hubungan kointegrasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian ini tidak hanya menguji teori ekonomi secara umum, tetapi juga mendalami bagaimana perubahan struktur industri dan pola investasi asing di Indonesia berinteraksi dengan perpindahan penduduk dalam membentuk kondisi ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh industrialisasi terhadap GDP di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang menggunakan pendekatan ARDL?

2. Bagaimana pengaruh FDI terhadap pertumbuhan ekonomi GDP di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang menggunakan pendekatan ARDL?
3. Bagaimana pengaruh urbanisasi terhadap GDP di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang menggunakan pendekatan ARDL?
4. Bagaimana pengaruh emisi CO₂ terhadap GDP di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang menggunakan pendekatan ARDL?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan membuktikan pengaruh industrialisasi terhadap GDP di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang menggunakan pendekatan ARDL.
2. Menganalisis pengaruh FDI terhadap GDP di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang menggunakan pendekatan ARDL.
3. Menganalisis pengaruh urbanisasi terhadap GDP di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang menggunakan pendekatan ARDL.
4. Menganalisis pengaruh emisi CO₂ terhadap GDP di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang menggunakan pendekatan ARDL.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi ilmiah mengenai faktor-faktor yang memengaruhi GDP Indonesia dengan menggunakan pendekatan ARDL, serta menjadi referensi tambahan bagi literatur ekonomi pembangunan terkait hubungan ekonomi dan lingkungan.

2. Manfaat Kebijakan

Memberikan masukan bagi pemerintah (khususnya instansi terkait seperti BKPM dan Kementerian Perindustrian) dalam merumuskan strategi pembangunan yang menyeimbangkan target GDP dengan pengelolaan investasi, urbanisasi, dan emisi karbon.

3. Manfaat Sosial

Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bagaimana aktivitas industri, arus investasi, dan perpindahan penduduk ke kota berkontribusi pada pendapatan nasional.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini dapat memberikan analisis yang lebih tajam, terfokus, dan mendalam, penulis menetapkan beberapa batasan penelitian yang menjadi ruang lingkup pembahasan. Penelitian ini dilakukan di negara Indonesia sebagai representasi dari negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar. Data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data sekunder dalam bentuk deret waktu (*time series*) dengan rentang periode 30 tahun, terhitung mulai tahun 1995 sampai dengan tahun 2024. Penentuan rentang waktu ini bertujuan untuk menangkap dinamika perubahan struktur ekonomi dan lingkungan secara jangka panjang, termasuk pengaruh fluktuasi ekonomi global dan domestik. Analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan jenis *software Eviews 12*.